

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Pembangunan perekonomian masih akan tetap berbasis pertanian secara luas. Namun, sejalan dengan tahapan-tahapan perkembangan perekonomian maka kegiatan jasa-jasa dan bisnis berbasis pertanian juga akan semakin meningkat, dengan kata lain juga kegiatan agribisnis akan menjadi salah satu kegiatan unggulan pembangunan ekonomi dalam bidang pertanian yang di dukung dengan adanya kegiatan penyuluhan.

Penyuluh pertanian sebagai bagian dari integral pembangunan pertanian merupakan salah satu upaya dalam memperdayakan petani dan pelaku usaha dalam pertanian lain untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani. Untuk itu kegiatan penyuluhan pertanian harus dapat mengakomodasikan aspirasi dan peran aktif petani dan pelaku usaha pertanian lainnya melalui pendekatan partisipatif. Pengembangan pembangunan pertanian dimasa mendatang perlu memberi perhatian khusus terhadap penyuluh pertanian, karena penyuluh pertanian merupakan salah satu kegiatan yang strategis dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan pertanian. Melalui kegiatan penyuluhan, petani di tingkatkan kemampuannya dalam mengelola usaha taninya dengan produktif, efisien, dan menguntungkan dalam kelompoknya terutama gapoktan sehingga petani dan keluarganya lebih sejahtera. Meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya adalah tujuan utama dari pembangunan pertanian.

Penyuluhan dalam pembangunan pertanian berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara praktek yang dijalankan oleh petani dengan pengetahuan dan teknologi petani yang selalu berkembang menjadi kebutuhan para petani itu sendiri (kartasapoetra, 1994 *dalam* Misiadi, 2015). Agar petani dapat melakukan praktek- praktek yang mendukung usaha tani maka petani membutuhkan informasi, inovasi dalam bidang pertanian. Informasi yang di peroleh dapat berupa penyuluhan pertanian yang di sampaikan oleh PPL (penyuluh pertanian lapangan) melalui penyelenggaraan kegiatan penyuluhan.

Penyuluhan dapat menjadikan sarana kebijaksanaan lebih efektif lagi untuk menjadikan pertanian yang maju dan mandiri. Sudah sejak lama pemerintah

Indonesia berusaha meningkatkan taraf hidup porsi terbesar dari struktur masyarakat Indonesia. Berbagai bentuk program telah diterapkan dalam membantu petani agar mampu memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dalam perekonomian di Indonesia. Berbagai program bantuan juga telah dilaksanakan melalui program subsidi sarana produksi, bantuan modal langsung, kredit usaha tani dan lain sebagainya yang jumlahnya sangat beragam. Namun hasilnya petani di Indonesia masih berpendapatan rendah, masih bergantung terhadap berbagai bantuan, dan masih berfikir belum mampu bergerak sendiri dalam melaksanakan usaha taninya, begitu pula dengan program-program penyuluhan pertanian yang selama ini sudah berjalan, serta belum mampu mendorong petani untuk menemukan atau memecahkan permasalahannya sendiri dalam melaksanakan usaha tani (Musher, 2008 *dalam* Misiadi, 2015)

Menyadari hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam merevitalisasikan penyuluhan, dan salah satu strategi dalam program tersebut adalah memperdayakan petani atau kelompok tani melalui gabungan kelompok tani atau gapoktan. Melalui gapoktan seluruh kekuatan yang dimiliki oleh petani dalam kelompoknya digabungkan untuk menggerakkan kelompok taninya. Dengan kata lain petani dididik untuk lebih mandiri dan menggandalkan kekuatan mereka sendiri. Selain itu ada yang lebih istimewa dalam program ini, ialah pemerintah ingin menaikkan status petani melalui program kemandirian dan kreativitas mereka, karena gapoktan akan berstatus hukum yang jelas sehingga memiliki daya tarik yang lebih tinggi dan diakui secara resmi sebagai suatu aset, akte notaris, dan lainnya sebagai layaknya perusahaan. Selain itu gapoktan diharapkan juga mampu berkembang menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri, sehingga gapoktan menjadi pemberdayaan petani andalan dari sektor pertanian saat ini (Mushero, 2008 *dalam* Misiadi, 2015).

Adapun di tingkat provinsi, penanggung jawab pengembangan gapoktan adalah Gubernur, dan sedangkan penanggung jawab operasionalnya dilaksanakan oleh sekretaris badan koordinasi penyuluh pertanian provinsi dan dibantu oleh dinas atau instansi terkait di tingkat provinsi. Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi yang sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Melihat kondisi tersebut perlu adanya dukungan sumber daya manusia

yang berkualitas melalui penyuluhan pertanian dengan pendekatan kelompok tani, agar produktivitas semakin meningkat dan sektor pertanian tetap bertahan di Kalimantan Barat. Salah satu Kabupaten di Kalimantan Barat yang mengandalkan sektor pertanian salah satunya adalah Kabupaten Bengkayang.

Wilayah Kabupaten Bengkayang memiliki luas areal 5.396,30 Km² yang terdiri dari 17 Kecamatan. Kabupaten Bengkayang yang cukup luas 75% diantaranya berupa lahan sawah, tanah perkebunan, tegalan dan kolam. Hasil pertanian di Kabupaten Bengkayang sebagai penyelenggara kebutuhan pangan di Kabupaten itu sendiri. Di Kabupaten Bengkayang, sebagai penghasil produksi pangan dan perkebunan, tentu juga harus memiliki kelembagaan petani yang berkembang dan mandiri agar petani lebih optimal melaksanakan usaha taninya untuk meningkatkan produksinya, salah satunya melalui gapoktan.

Keberadaan gapoktan di Kabupaten Bengkayang tidak luput dari peran penyuluh pertanian yang berada di BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) yang mempunyai tujuan meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani di wilayah tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat perkembangan gapoktan tidak selalu berjalan dengan baik masih terdapat beberapa hambatan yang di hadapi dalam pengembangannya. Menurut pengamatan awal, masih banyak gapoktan yang ada di Kecamatan Bengkayang hanya berjalan ditempat atau ada juga sebagian unit usaha tani yang dikelola oleh gapoktan menjadi vakum hal tersebut di sebabkan oleh ketiadaan modal, kurang efektifnya komunikasi antar pengurus dengan anggota Gapoktan dan juga masih rendahnya peran penyuluh dalam memperdayakan Gapoktan. Selain hal tersebut, masalah yang tidak kalah pentingnya yaitu kelembagaan petani dalam hal ini gapoktan cenderung hanya diposisikan sebagai alat untuk mengimplementasikan proyek belaka, belum sebagai upaya untuk pemberdayaan yang lebih mendasar dengan kata lain gapoktan di bentuk apabila ada program pemerintah yang akan di turunkan, bukan karena adanya niat tulus dan kemauan dari kelompok tani itu sendiri untuk mendirikannya. gapoktan diharapkan dapat berperan sebagai aset komunitas masyarakat desa yang partisipatif di masa mendatang, maka pengembangan kelembagaan mestilah di rancang sebagai upaya untuk peningkatan kapasitas masyarakat itu sendiri sehingga menjadi mandiri. Pembentukan dan

pengembangan gapoktan yang akan di bentuk di setiap desa, juga harus menggunakan basis sosial kapital setempat dengan prinsip kemandirian lokal, yang di capai melalui prinsip keotonomian dan pemberdayaan. Penyuluh dalam hal ini harus mampu berperan sebagai fasilitator, dinamisator, teknis dan konsultan dalam pengembangan gapoktan. Untuk itu di perlukan suatu penelitian mengenai **“Peran penyuluh pertanian dalam pengembangan Gapoktan di Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pengembangan gapoktan yang ada di Kabupaten Bengkayang?
2. Bagaimana peran penyuluh pertanian dalam pengembangan Gapoktan di Kabupaten Bengkayang?
3. Bagaimana hubungan peran penyuluh pertanian dengan pengembangan Gapoktan di Kabupaten Bengkayang?

C. Tujuan Pengkajian

Adapun tujuan pengkajian yang akan di lakukan adalah:

1. Mengkaji tingkat pengembangan gapoktan yang ada di Kabupaten Bengkayang
2. Mengkaji peran penyuluh pertanian dalam pengembangan gapoktan di Kabupaten Bengkayang
3. Mengkaji tingkat hubungan peran penyuluh dengan pengembangan gapoktan di Kabupaten Bengkayang

D. Kegunaan Pengkajian

Adapun dari kegunaan pengkajian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberi gambaran tentang peran penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkayang dalam pengembangan gapoktan sehingga dapat meningkatkan program penyuluhan pertanian?

2. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana saint terapan di Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Medan.
3. Bagi peneliti lain, sebagai landasan dan informasi untuk penelitian sejenisnya, serta dapat pula sebagai titik tolak ukur untuk melaksanakan penelitian serupa dalam lingkup yang lebih luas.
4. Bagi pemerintah dan instansi terkait, di harapkan dapat menjadi informasi dan suatu bahan landasan untuk menentukan kebijakan pengembangan secara keseluruhan.
5. Menambah pengetahuan dan bahan kegiatan penyuluhan terutama yang berhubungan langsung dengan pengembangan gapoktan.

E. Hipotesis

Adapun Hipotesis yang diajukan adalah;

1. Diduga bahwa tingkat pengembangan peran penyuluh pertanian dalam gapoktan masih belum optimal.
2. Diduga Bahwa peran penyuluh (pembimbing, organisator dan dinamisator, pelatihan teknisi, dan fasilitator petani) yang dinilai dalam persepsi anggota kelompok dalam pengembangan kelompoktani masih rendah.
3. Diduga bahwa ada hubungan peran penyuluh dalam pengembangan kelompoktani di Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang.